

## **Pencegahan Pemotongan Sapi Betina Produktif melalui Tata Kelola Lembaga Korporasi Perusahaan Daerah**

### **(Prevention of Productive Cows Slaughter through Management of Local State Enterprises)**

Atien Priyanti<sup>1</sup>, I Inounu<sup>1</sup> dan N Ilham<sup>2</sup>

<sup>1</sup>*Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Jl. Raya Pajajaran Kav. E-59, Bogor 16128*

<sup>2</sup>*Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Jl. Tentara Pelajar Cimanggu Blok Kompleks Pertanian No.3, Bogor 16124  
atienpriyanti@litbang.pertanian.go.id*

(Diterima 3 Oktober 2016 – Direvisi 8 April 2017 – Disetujui 29 Mei 2017)

#### **ABSTRACT**

Based on the last national livestock census in 2013, the population number of cattle and buffalo have reduced by 15% compared to that in 2011. The highest reduction happened in Java that reached around 24-27%, while that in Bali and Nusa Tenggara was 25%. One of the reasons was caused by decreasing number of cows due to the increase of productive cows slaughtered every year. Number of cows slaughtered in Bali, Nusa Tenggara, and South Sulawesi had reached on average of 72% from total slaughtered, where more than 90% were productive cows. Reasons for slaughtering productive cows were due to: (1) Lower cows price; (2) Limited bulls supply; (3) Local government regulation on inter-island trade; (4) Weak and inconsistent law enforcement; and (5) Lack of understanding on criteria for productive cows by farmers. Increased rate of slaughtered cattle and increasing rate of inter-island trade volumes that higher than the rate of cattle population had caused the decrease of national cattle population. There are currently needs to improve and develop operation slaughter-houses under management of local state enterprise. The management applies on certain mechanisms that sort of incoming productive females according to different grades into allowable to be slaughtered and selected for breeding females, which could be further traded inter-island as supplier of cows for other regions. This strategy may help the central government to meet the demand for productive cows, particularly in Sumatera and Kalimantan which have abundance of feed biomass resources. Policy support is needed as instruments for all interested stakeholders including those who are willing to invest in cattle development such as oil-palm estates.

**Key words:** Local state enterprise, slaughter, productive cow

#### **ABSTRAK**

Sensus terakhir peternakan nasional tahun 2013 menunjukkan bahwa populasi sapi dan kerbau mengalami penurunan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun 2011. Penurunan populasi terjadi paling besar di Jawa mencapai sekitar 24-27%, sedangkan di Bali dan Nusa Tenggara mencapai 25%. Salah satu penyebabnya adalah karena menurunnya jumlah sapi betina akibat tingkat pemotongan yang terus meningkat setiap tahun. Pemotongan ternak betina di Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi Selatan mencapai rata-rata 72% dari total pemotongan, dimana lebih dari 90% adalah betina produktif. Berbagai penyebab pemotongan ternak betina produktif ini diantaranya diakibatkan oleh: (1) Harga sapi betina lebih murah; (2) Terbatasnya ketersediaan sapi jantan; (3) Adanya penetapan kuota perdagangan antar-pulau; (4) Belum konsistennya penegakan hukum; dan (5) Belum adanya kesepahaman kriteria ternak betina produktif utamanya oleh peternak. Laju peningkatan pemotongan ternak dan laju kenaikan perdagangan ternak antar wilayah atau pulau yang lebih tinggi dibandingkan dengan laju peningkatan populasi di wilayah sumber ternak potong dapat menyebabkan semakin terkurasnya populasi ternak potong di dalam negeri. Oleh sebab itu, perlu dibangun suatu Perusahaan Daerah (PD) dengan kewenangan untuk menjaring ternak-ternak betina yang masuk ke rumah potong hewan atau diseleksi untuk sapi induk. Melalui mekanisme tertentu, ternak yang telah menjadi milik PD dapat diperdagangkan antar pulau sebagai sumber pemasok sapi indukan bagi wilayah lain. Hal ini juga dapat membantu berlangsungnya program pemerintah dalam memenuhi sapi indukan, utamanya di Sumatera dan Kalimantan yang memiliki biomasa pakan berlimpah, dan justru “kosong sapi”. Perlu dibangun kebijakan atau instrumen yang memperhatikan kepentingan semua pihak, termasuk insentif bagi daerah asal maupun daerah pengembangan ternak potong.

**Kata kunci:** Perusahaan daerah, pemotongan, sapi betina produktif

#### **PENDAHULUAN**

Permintaan daging sapi nasional cenderung meningkat dari tahun ke tahun, dimana pada tahun

2015 rata-rata konsumsi daging mencapai 2,56 kg/kapita atau secara nasional mencapai 653.980 ton. Pemenuhan konsumsi ini diperoleh dari sapi lokal sebanyak 416.090 ton (64%) setara dengan 2,45 juta

ekor sapi hidup dan impor sejumlah 237.890 ton (34%) setara dengan sapi hidup sebesar 1,4 juta ekor (Tawaf 2015). Pasokan impor ini terdiri dari sapi bakalan sejumlah 720 ribu ekor, sedangkan dalam bentuk daging beku setara dengan sapi hidup sejumlah 680 ribu ekor. Distribusi konsumen daging sapi ini tidak merata, dimana konsumen daging sapi hanya terkonsentrasi pada kelompok rumah tangga berpendapatan tinggi di perkotaan (23%) dan di perdesaan (7%) (BPS 2014). Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta dan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,5% per tahun (BPS 2015), serta dibarengi dengan perkembangan ekonomi dan perubahan gaya hidup maupun pola makan penduduk perkotaan, tidak dapat dipungkiri bahwa konsumsi daging sapi akan terus bertambah. Meningkatnya kelompok rumah tangga konsumen golongan menengah ke atas, mencapai 57 juta jiwa (Oberman et al. 2012) yang juga merupakan konsumen utama daging sapi dan menambah permintaan daging sapi, serta diprediksi akan terus meningkat.

Pemerintah telah berupaya untuk memenuhi kebutuhan daging sapi nasional, salah satunya melalui Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau yang telah dicanangkan pada tahun 2014. Namun upaya ini belum dapat tercapai hingga kini dengan salah satu penyebabnya adalah terjadinya pemotongan sapi betina produktif (SBP) yang berlebihan. Hal ini ditengarai dengan kenyataan, khususnya di wilayah Indonesia Timur bahwa: (1) Pemotongan sapi muda atau sapi dengan ukuran kecil di bawah potensi genetik dan potensi ekonominya; serta (2) Pemotongan sapi betina produktif yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan sapi jantan. Diperkirakan jumlah pemotongan sapi betina produktif mencapai 200 ribu setiap tahunnya, bahkan mungkin melebihi angka tersebut pada 2-3 tahun terakhir. Berdasarkan harga rata-rata masing-masing induk sapi Bali sebesar Rp. 8-10 juta/ekor dan bakalan umur setahun sekitar Rp. 5-6 juta/ekor, diperkirakan terjadi kerugian ekonomi sebesar Rp. 1,6-2 triliun setiap tahunnya untuk indukan dan sekitar Rp. 4,2-5,04 triliun sepanjang hidup seekor induk sapi Bali dengan rata-rata enam kali beranak.

Talib (2002) melaporkan bahwa sapi Bali memiliki potensi genetik mencapai bobot dewasa di wilayah sumber bibit (Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Bali) berkisar antara 280-478 kg, sedangkan untuk sapi Peranakan Ongole (PO) mencapai 201-420 kg (Astuti 2004). NTT yang merupakan salah satu pusat atau sumber populasi sapi potong, sering mengalami kekurangan pakan ketika musim kering. Beberapa laporan penelitian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus

tingkat kematian pedet pada saat kemarau dapat mencapai 40-45%, karena kurang pakan/air dan serangan penyakit (Bamualim 2011). Hal yang senada juga terjadi pada kondisi lapang di Sulawesi Selatan dengan tingkat kematian pedet mencapai 49,5% (Baco et al. 2014). Dalam jangka panjang sangat sulit mengandalkan wilayah ini sebagai pemasok utama daging untuk keperluan di dalam negeri sehingga perlu dicarikan alternatif pengembangannya.

Berdasarkan sensus tahun 2013, populasi sapi dan kerbau menurun cukup tinggi yaitu sekitar 2,5 juta ekor (15%) dibandingkan dengan pendataan sapi perah, potong dan kerbau (PSPK) 2011. Penurunan populasi terjadi paling besar di Jawa Timur, Bali, DIY dan Jawa Tengah. Hasil PSPK tahun 2011 dan sensus ternak tahun 2013 menunjukkan bahwa penyebaran sapi potong masih terkonsentrasi di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, walaupun terdapat kecenderungan hal tersebut di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi terus mengalami peningkatan. Populasi sapi di Jawa yang semula 8,5 juta ekor pada tahun 2011, menurun cukup signifikan sekitar 24-27% menjadi hanya sekitar 6,5 juta ekor pada tahun 2013. Hal serupa di Bali dan Nusa Tenggara terjadi penurunan sekitar 25% dari yang semula berjumlah 2,36 juta ekor pada tahun 2011, menjadi 2,13 juta ekor pada tahun 2013 (Kementan-BPS 2011; BPS 2013). Salah satu penyebab menurunnya populasi tersebut adalah karena menurunnya jumlah sapi betina akibat tingkat pemotongan yang cenderung terus meningkat setiap tahun.

Makalah ini bertujuan untuk mengemukakan gagasan dan pemikiran dalam penyelamatan SBP sebagai mesin penggerak utama penghasil daging sapi untuk mewujudkan peningkatan populasi sapi di dalam negeri. Ruang lingkup penyelamatan SBP dalam hal ini diakibatkan karena tingkat pemotongan dan arus pengeluaran ternak dari wilayah sumber ternak potong. Diperlukan adanya alternatif rekomendasi kebijakan yang sangat bermanfaat jika sapi-sapi betina produktif yang sedianya dipotong ini didistribusikan ke wilayah sumber pakan seperti Sumatera dan Kalimantan untuk tujuan usaha perkembangbiakkan (*cow calf operation/CCO*). Hal ini dapat berdampak terhadap: (1) Populasi sapi secara nasional lebih tersebar dan meningkat; (2) Bali dan Nusa Tenggara memperoleh harga jual sapi lebih tinggi bila sapi dijual sebagai bibit atau calon bibit; dan (3) Populasi sapi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara lebih terkontrol, terjaga dan terpelihara. Untuk mewujudkan pemikiran ini diperlukan berbagai instrumen kebijakan dan insentif, baik bagi pelaku usaha, maupun pihak-pihak yang terkait dengan pemikiran ini.

## PEMATONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF DI WILAYAH SUMBER TERNAK POTONG

Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang kemudian dilakukan Perubahan atas UU No 18/2009 menjadi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 dinyatakan dalam Pasal 18 bahwa: (1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong; (2) Penentuan ternak ruminansia betina yang produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dokter Hewan berwenang; (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan penangkaran dan penyediaan bibit ternak ruminansia di daerah tersebut untuk keperluan pengembangbiakkan dan penyediaan bibit ternak ruminansia betina di daerah tersebut; (4) Setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia betina produktif; (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikecualikan dalam hal penelitian, pemuliaan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, ketentuan agama, ketentuan adat istiadat dan/atau pengakhiran penderitaan hewan; (6) Setiap orang harus menjaga populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar; dan (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyeleksian dan penyingkiran sebagaimana pada ayat (1), penjaringan ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri.

Larangan pematongan SBP sebagaimana diamanatkan undang-undang tersebut di atas tidak sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapang. Bukti empiris pematongan sapi dan kerbau di rumah potong hewan (RPH) di wilayah Timur Indonesia sebagai sumber ternak potong yang diwakili oleh NTT, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali dan Sulawesi Selatan. Hal ini juga meliputi perkembangan pematongan ternak dan perdagangan antar pulau (wilayah).

### Pematongan ternak di wilayah sentra ternak potong

Wilayah sentra ternak potong dalam hal ini meliputi daerah di kawasan Timur Indonesia, yaitu Provinsi NTT, NTB, Bali dan Sulawesi Selatan. Populasi sapi potong dan kerbau di wilayah ini mencapai 27% dari populasi nasional (Ditjen PKH 2016).

Penyediaan daging di NTT berasal dari ternak yang dipotong baik di pematongan resmi di RPH maupun di luar RPH yang dilaporkan melalui *keurmater* yang bertugas di masing-masing kecamatan. RPH di NTT saat ini mencapai 56 unit, dimana 96% merupakan RPH yang dimiliki oleh pemerintah daerah, sedangkan hanya dua unit yang dimiliki oleh swasta (BPS NTT 2015). Sekitar 17% ternak sapi dan kerbau masih dipotong diluar RPH atau dinamakan Tempat Pematongan Hewan (TPH). Jumlah pematongan sapi dalam beberapa tahun terakhir juga cenderung terus meningkat, seiring dengan perkembangan pembangunan Provinsi NTT, khususnya Kota Kupang. Pematongan sapi terbanyak untuk kebutuhan lokal dilakukan di RPH Kota Kupang, dengan jumlah pematongan berkisar antara 50-60 ekor/hari dan dapat meningkat hampir dua kali lipat pada hari raya.

Tabel 1 menunjukkan bahwa pematongan ternak sapi di NTT selama periode 2010-2015 mengalami peningkatan sebesar 10,3% per tahun, sebaliknya hal tersebut untuk ternak kerbau mengalami penurunan sebesar 2% per tahun. Hal ini diduga karena semakin menurunnya populasi kerbau di tingkat nasional secara signifikan selama dua dekade ini, dari awalnya sekitar 3 juta ekor pada tahun 1991 menjadi hanya tinggal 1,3 juta ekor pada tahun 2011 (Sianturi et al. 2012). Penurunan populasi kerbau disebabkan oleh jumlah pematongan yang terus meningkat dan relatif lebih besar daripada jumlah penambahan populasi, menurunnya lahan penggembalaan dan kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan usaha kerbau. Disamping itu, secara alamiah ternak kerbau memiliki tingkat reproduksi yang rendah dengan indikator umur pubertas yang lebih lambat dan selang beranak yang lebih panjang dibandingkan dengan sapi (Yendraliza et al. 2012).

Pematongan ternak sapi di NTB terus meningkat setiap tahun dengan laju kenaikan sebesar 1,6% per tahun selama periode 2010-2015. Pematongan tercatat dilakukan di RPH yang berjumlah 34 unit dan tersebar di 10 kabupaten. RPH terbesar adalah di Kota Mataram yaitu RPH Negeri Majeluk yang berdiri sejak tahun 1967 merupakan UPT Dinas Pertanian dan Kelautan Pemerintah Kota Mataram. Rata-rata pematongan sehari berkisar 30-50 ekor, dengan pasokan sebagian besar adalah sapi Bali. Pematongan ternak kerbau tercatat mengalami penurunan yang sangat signifikan mencapai 7,3% per tahun dalam periode yang sama. Pematongan ternak sapi dan kerbau juga dilakukan di TPH yang disinyalir jumlahnya melebihi dari pematongan tercatat di RPH. Dalam satu kawasan, terdapat sekitar 20-30 orang jagal yang memotong sapi dan/atau kerbau rata-rata 1-2 ekor per hari. Hal ini dilakukan secara turun temurun dan masih tradisional sehingga aspek higienis masih jauh dari sempurna.

**Tabel 1.** Jumlah pemotongan ternak sapi dan kerbau di sentra ternak potong 2010-2015 (ekor)

Jenis ternak	Tahun						Laju pertumbuhan (% per tahun)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>NTT</b>							
Sapi	50.674	69.921	72.709	73.886	77.710	81.990	10,30
Kerbau	9.020	8.252	8.264	7.352	6.881	7.906	-2,06
<b>Jumlah</b>	<b>59.694</b>	<b>78.173</b>	<b>80.973</b>	<b>81.238</b>	<b>84.591</b>	<b>89.896</b>	<b>8,43</b>
<b>NTB</b>							
Sapi	47.930	50.521	55.142	46.593	51.270	52.618	1,63
Kerbau	12.187	11.510	11.048	7.067	7.429	6.856	-7,30
<b>Jumlah</b>	<b>60.117</b>	<b>62.031</b>	<b>66.190</b>	<b>53.660</b>	<b>58.699</b>	<b>59.474</b>	<b>-0,18</b>
<b>Bali</b>							
Sapi	36.878	47.647	51.643	44.938	38.471	34.134	-1,24
Kerbau	92	52	5	83	116	113	3,80
<b>Jumlah</b>	<b>36.970</b>	<b>47.699</b>	<b>51.648</b>	<b>45.021</b>	<b>38.587</b>	<b>34.247</b>	<b>-1,23</b>
<b>Sulawesi Selatan</b>							
Sapi	59.325	72.228	75.858	91.997	107.205	101.020	11,71
Kerbau	9.975	11.779	12.621	16.016	16.248	16.599	11,07
<b>Jumlah</b>	<b>69.300</b>	<b>84.007</b>	<b>88.519</b>	<b>108.013</b>	<b>123.453</b>	<b>117.619</b>	<b>11,62</b>

**Sumber:** Dinas PKH Provinsi Nusa Tenggara Timur (2015), Dinas PKH Provinsi Nusa Tenggara Barat (2015), Dinas PKH Provinsi Bali (2015), Dinas PKH Provinsi Sulawesi Selatan (2015), data diolah

Hermansyah & Mastur (2008) dalam studi kasus di Mataram melaporkan bahwa pemotongan ternak tidak tercatat mencapai 25% akibat ditutupnya salah satu RPH yang berlokasi strategis di tengah kota. Hal ini tidak diimbangi dengan penyiapan fasilitas sebagaimana yang ditentukan untuk suatu RPH dan keengganan para jagal untuk memotong ternaknya di RPH yang resmi.

Pemotongan ternak sapi di Bali mengalami penurunan sebesar 1,24% per tahun pada periode yang sama. Pemotongan ternak sapi tertinggi dicapai pada tahun 2012 yang lebih dari 50 ribu ekor, dan menurun secara konsisten hingga akhir tahun 2015 yang mencapai 34 ribu ekor. Pemotongan ternak kerbau secara tercatat justru menunjukkan kenaikan sebesar 3,8% per tahun dalam periode yang sama. Seperti halnya dengan NTB, pemotongan ternak sapi dan kerbau juga terjadi di luar RPH yang resmi sehingga sulit untuk memperoleh jumlah pemotongan yang akurat.

Pemotongan ternak sapi dan kerbau di Sulawesi Selatan merupakan pemotongan yang dicatat oleh petugas *keurmaster* di RPH maupun petugas pencatat di luar RPH baik TPH maupun pemotongan yang dilakukan di masyarakat. Jumlah pemotongan ternak sapi dan kerbau tercatat cukup signifikan, masing-masing sebesar 11,7 dan 11,1% per tahun selama periode 2010-2015. Pemotongan ternak sapi tertinggi dicapai pada tahun 2014 sebesar 107 ribu ekor yang

hampir dua kali lipat lebih besar dibandingkan pada tahun 2010. Hal yang hampir sama juga terjadi pada pemotongan ternak kerbau yang hampir dua kali lipat pada tahun 2015 dibandingkan dengan tahun 2010. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan daging sapi dan kerbau terus meningkat setiap tahun dan harus diimbangi dengan peningkatan jumlah populasi di wilayah Sulawesi Selatan.

Pengamatan di lapang terhadap pemotongan ternak secara sampling dilakukan selama tiga hari berturut-turut untuk mengetahui deskripsi yang nyata di RPH di Kupang (NTT), RPH Majeluk di Mataram (NTB), RPH Kota Denpasar dan Badung (Bali), serta RPH Kota Makassar (Sulawesi Selatan). Hasil pengamatan di RPH Kupang menunjukkan bahwa pemotongan sapi betina mencapai rata-rata 91% setiap hari (Tabel 2). Jenis sapi yang dipotong adalah sapi Bali yang sudah berkembang biak dengan baik di Pulau Timor. Semua sapi betina yang dipotong termasuk dalam kategori muda/produktif dan sebagian dalam kondisi bunting, serta sekitar dua ekor yang termasuk dalam kategori cacat (kaki patah). Terdapat sekitar 9-14 orang jagal yang selalu menggunakan fasilitas di RPH Kota Kupang, dengan rata-rata pemotongan per hari berkisar 2-5 ekor/jagal.

Tabel 2 menunjukkan bahwa di RPH Majeluk (NTB) sekitar 24 ekor sapi dipotong setiap hari, dimana 32,8% adalah sapi betina. Selama periode ini tidak ditemukan pemotongan ternak kerbau, dimana

petugas RPH menyatakan bahwa ternak kerbau pada umumnya dipotong menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius karena potensi untuk meningkatkan populasi ternak sapi menjadi berkurang akibat dipotongnya sapi betina. Berdasarkan jumlah pemotongan sekitar 60 ribu ekor/tahun, diperkirakan terdapat 15 ribu ekor SBP yang dipotong sehingga terdapat potensi 10 ribu ekor yang dapat dijadikan sapi indukan. Pemerintah daerah telah memberlakukan insentif bagi sapi bunting di atas lima bulan sebesar Rp. 1 juta bagi peternak yang memelihara, namun dipandang hal ini belum berjalan dengan baik. Program ini ditindaklanjuti dengan sistem pengkartuan ternak, dengan insentif sebesar Rp. 450 ribu/ekor ternak. Hal ini ditujukan agar sapi-sapi tercatat yang hanya bisa dijual ke pasar hewan dan tidak diperbolehkan untuk menjual sapi betina, kecuali sapi afkir (tua, mandul, cacat dan lain sebagainya). Namun tampaknya, hal ini juga belum sepenuhnya efektif dapat dilaksanakan.

Hasil pengamatan di RPH Kota Denpasar dan Kota Badung selama tiga hari berturut-turut menunjukkan bahwa pemotongan sapi rata-rata berjumlah 28 ekor/hari. Memang belum dapat dipastikan bahwa ternak sapi betina yang dipotong termasuk dalam kriteria sapi betina produktif, namun dengan kondisi ternak yang masih muda dan bobot badan kurang dari 250 kg, sudah dapat menjadi indikator bahwa sebagian besar ternak sapi betina tersebut adalah SBP. Berdasarkan jumlah pemotongan ternak sapi yang mencapai 40 ribu ekor/tahun, maka dengan rata-rata pemotongan sapi betina mencapai 90%, maka terdapat sapi betina dipotong sebesar 36 ribu. Hal ini diperkirakan akan terdapat sekitar 30 ribu ekor sapi betina produktif yang berpotensi untuk dijadikan sapi indukan setiap tahunnya.

Terdapat sekitar 44 RPH yang tersebar di 20 kabupaten di Sulawesi Selatan, dimana RPH Tamangapa di Kota Makassar merupakan salah satu RPH rujukan. RPH ini pada awalnya didirikan di bawah pengelolaan Dinas Peternakan Kotamadya Ujung Pandang, dimana sejak tahun 1999 hal ini berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda) berdasarkan Perda No.6/1999. Terdapat sekitar 13 jagal yang masih aktif saat ini dalam melakukan pemotongan ternak setiap hari, dimana lima orang jagal melakukan pemotongan sampai lebih dari 5 ekor/hari dan selebihnya hanya memotong 1-2 ekor/hari. Rata-rata pemotongan mencapai 60 ekor/hari, sedangkan 3-4 tahun yang lalu dapat mencapai 100 ekor/hari. Hasil pengamatan selama dua malam berturut-turut menunjukkan bahwa terdapat sekitar 72,6% ternak sapi betina dipotong (Tabel 2), dimana dapat dinyatakan bahwa ternak-ternak ini adalah sapi betina yang relatif masih muda dan produktif karena beberapa induk masih diikuti oleh pedet yang masih menyusui.

Pengamatan di RPH ini tidak ditemui adanya pemotongan ternak kerbau dan disinyalir masih cukup banyak ternak kerbau yang dipotong di TPH yang dilakukan oleh masyarakat secara tradisional. Informasi dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan menyatakan bahwa pemotongan sapi dan kerbau di luar RPH ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan yang tercatat di RPH. Hal ini mengindikasikan juga tidak menutup kemungkinan bahwa jumlah ternak betina produktif yang terpotong juga lebih banyak. Hastang et al. (2014) menyatakan bahwa pemotongan sapi betina produktif di RPH Kota Makassar selama periode Januari-Juni 2013 mencapai rata-rata 60% setiap harinya.

### **Pengeluaran ternak dari wilayah sentra ternak potong**

Perdagangan ternak sapi dan kerbau antar pulau sudah berlangsung sejak lama, baik dari NTT, NTB, Bali dan Sulawesi Selatan dan cenderung menurun realisasinya dibandingkan dengan yang telah dialokasikan setiap tahun. Rata-rata pedagang antar pulau di NTT sudah cukup berpengalaman dengan lama berusaha di atas 10 tahun melakukan perdagangan sapi, baik sapi untuk bibit maupun sapi potong. Ternak sapi yang diperdagangkan antar pulau pada umumnya adalah sapi Bali, dimana sapi betina untuk bibit dan sapi jantan untuk tujuan pemotongan. Pada periode tahun 2010-2014, realisasi pengeluaran ternak sapi dan kerbau dari NTT menurun masing-masing sebesar 0,09 dan 2,68%. Hal ini mengindikasikan bahwa NTT tidak mampu memenuhi permintaan ternak sapi, utamanya sejak tahun 2012 (Tabel 3). Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan populasi sapi di Provinsi NTT hanya mencapai 8,4% per tahun pada periode 2010-2015 sehingga laju peningkatan populasi sapi relatif lebih kecil dibandingkan dengan laju kenaikan pemotongan dan perdagangan ternak sapi antar pulau atau wilayah. Tidak dapat dipungkiri bahwa semakin banyak terjadi pengurusan ternak sapi di NTT, sedangkan program peningkatan populasi belum memberikan hasil yang memenuhi harapan.

Pengeluaran sapi potong dan sapi indukan di Provinsi NTB secara bertahap mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2015, kuota pengeluaran sapi potong mencapai 34,4 ribu ekor dan sapi indukan sekitar 10 ribu ekor dari sekitar 15 ribu ekor pada tahun sebelumnya. Perkembangan pengeluaran sapi potong dan sapi indukan selama periode 2010-2015 menunjukkan peningkatan masing-masing dengan laju kenaikan sebesar 23,6 dan 12,8% per tahun. Sapi indukan diperdagangkan antar pulau dengan tujuan utama Kalimantan, sebagian Sumatera, Sulawesi Tenggara dan Papua. Direncanakan Pemerintah Daerah NTB akan mengeluarkan karkas sapi sehingga kuota

**Tabel 2.** Jumlah pemotongan ternak sapi dan kerbau di empat RPH di sentra ternak potong tahun 2015 (ekor)

Tanggal/hari ke-	Ternak sapi		Jumlah (ekor)	Proporsi betina terhadap total (%)
	Jantan	Betina		
<b>RPH Kota Kupang (NTT)</b>				
28 September, hari ke-1	5	57	62	91,93
29 September, hari ke-2	3	47	50	94,00
30 September, hari ke-3	7	47	54	87,04
<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>151</b>	<b>166</b>	<b>90,96</b>
<b>RPH Majeluk, Mataran (NTB)</b>				
28 September, hari ke-1	15	7	22	31,81
29 September, hari ke-2	20	9	29	31,03
30 September, hari ke-3	14	8	22	36,36
<b>Total</b>	<b>49</b>	<b>24</b>	<b>73</b>	<b>32,88</b>
<b>RPH di Kota Denpasar dan Badung (Bali)</b>				
28 September, hari ke-1	3	29	32	90,63
29 September, hari ke-2	3	28	31	90,32
30 September, hari ke-3	3	27	30	90,00
<b>Total</b>	<b>9</b>	<b>84</b>	<b>93</b>	<b>90,32</b>
<b>RPH Kota Makasar (Sulawesi Selatan)</b>				
28 Oktober, hari ke-1	17	49	66	74,24
29 Oktober, hari ke-2	14	33	47	70,21
<b>Total</b>	<b>31</b>	<b>82</b>	<b>113</b>	<b>72,57</b>

**Tabel 3.** Jumlah pengeluaran ternak sapi dan kerbau dari sentra ternak potong, 2010-2015

Jenis ternak	Tahun						Laju pertumbuhan (% per tahun)
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
<b>NTT</b>							
Sapi	49.876	45.967	61.138	61.138	49.658	TD	-0,09
Kerbau	3.607	4.892	3.821	3.821	3.124	TD	-2,68
<b>Total</b>	<b>53.483</b>	<b>50.859</b>	<b>64.959</b>	<b>64.959</b>	<b>52.782</b>	<b>TD</b>	<b>-0,26</b>
<b>NTB</b>							
Sapi potong	5.601	11.713	13.590	20.793	20.555	13.52	23,56
Sapi indukan	3.978	7.131	9.989	16.743	9.885	7.049	12,87
Kerbau potong	2.722	5.990	4.055	5.353	3.224	2.399	-1,99
Kerbau indukan	152	TD	TD	278	TD	TD	TD
<b>Total</b>	<b>12.453</b>	<b>24.834</b>	<b>27.634</b>	<b>43.167</b>	<b>33.664</b>	<b>22.968</b>	<b>14,07</b>
<b>Bali</b>							
Sapi	69.607	73.184	87.537	58.172	58.920	52.095	-41,93
Kerbau	122	391	62	13	TD	TD	
<b>Total</b>	<b>69.729</b>	<b>73.575</b>	<b>87.599</b>	<b>58.185</b>	<b>58.920</b>	<b>52.095</b>	<b>-42,15</b>
<b>Sulawesi Selatan</b>							
Sapi	5.961	6.264	11.124	23.480	13.194	20.500	40,65
Kerbau	TD	TD	1	480	3	TD	
<b>Total</b>	<b>5.961</b>	<b>6.264</b>	<b>11.125</b>	<b>23.960</b>	<b>13.197</b>	<b>20.500</b>	<b>40,65</b>

TD: Tidak ada data

**Sumber:** Dinas PKH Provinsi Nusa Tenggara Timur (2015), Dinas PKH Provinsi Nusa Tenggara Barat (2015), Dinas PKH Provinsi Bali (2015), Dinas PKH Provinsi Sulawesi Selatan (2015), data diolah

pengeluaran sapi hidup akan semakin menurun. Kebijakan perdagangan yang kondusif sangat diperlukan dalam membangun usaha sapi potong berkelanjutan sehingga dapat memberikan insentif yang memadai bagi para peternak. Usaha ini membutuhkan investasi jangka panjang dan disinsentif kebijakan perdagangan akan memiliki konsekuensi jangka panjang yang sulit untuk segera dipulihkan kembali karena beban psikologis dan ekonomi yang cukup besar bagi peternak (Rusastra 2014).

Hasil analisis struktur populasi ternak sapi di NTB menunjukkan bahwa jumlah sapi dewasa sebagai mesin penghasil pedet relatif lebih rendah dibandingkan dengan sapi-sapi anak dan muda. Terlebih lagi, jumlah sapi muda betina juga relatif lebih rendah dibandingkan dengan sapi muda jantan, yang dapat memperlambat terjadinya replacement bagi sapi betina dewasa. Guna meningkatkan populasi di NTB, maka laju kenaikan populasi harus relatif lebih besar dibandingkan dengan laju peningkatan pematongan ternak, dan harus tetap dapat mengurangi jumlah pematongan sapi betina.

Pengeluaran ternak sapi dari Provinsi Bali mengalami penurunan sebesar 4,2% per tahun dalam periode 2010-2015. Sapi yang diperdagangkan antar pulau dengan tujuan DKI Jakarta dan Jawa Barat sebagai pasar utama untuk sapi potong, sedangkan untuk pasar sapi indukan utamanya adalah memasok permintaan dari wilayah Kalimantan Timur. Informasi tentang perdagangan ternak kerbau tidak diperoleh secara akurat dan hal ini juga mengindikasikan bahwa pengembangan ternak kerbau kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Saat ini perdagangan sapi potong dilakukan dengan sistem kuota dan pembatasan berat badan yang dapat diantar-pulaukan yaitu lebih dari 375 kg. Hal ini tertuang dalam Perda No. 2/2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali ke Wilayah Luar Bali dan diduga menyebabkan terjadinya penurunan perdagangan sapi Bali ke luar wilayah. Namun, disinyalir juga terjadi perdagangan ilegal yang cukup marak akibat diterbitkannya peraturan ini karena tidak semua sapi Bali dapat menghasilkan berat badan lebih dari 375 kg. Di sisi lain, pasar lokal sapi jantan baik dengan berat di atas atau di bawah 375 kg tidak menguntungkan jagal pada kondisi harga daging di pasar lokal, karena jagal lebih memilih sapi-sapi betina yang relatif kecil agar dapat habis dijual dalam satu hari.

Perkembangan populasi ternak sapi dan kerbau di Provinsi Bali cukup mengkhawatirkan, karena selama periode 2010-2015 menunjukkan penurunan masing-masing sebesar 2,7 dan 9,3% (Dinas PKH Provinsi Bali 2015). Meskipun laju pematongan dan pengeluaran ternak sapi dalam periode yang sama juga mengalami tingkat penurunan yang konsisten, hal ini harus segera diatasi untuk tidak mengakibatkan semakin menurunnya populasi ternak sapi di Bali. Proporsi

pematongan ternak sapi betina yang cukup tinggi akan semakin memperparah kondisi ini, terlebih proporsi sapi Bali betina muda dan dewasa yang berperan sebagai mesin penghasil pedet hanya mencapai 35% dari total populasi sapi betina yang ada.

Pengeluaran ternak sapi dari Provinsi Sulawesi Selatan sebagian besar dipasok dari Kabupaten Jeneponto, Sidrap, Bone dan Gowa yang merupakan wilayah sumber ternak sapi. Jumlah pengeluaran ternak sapi cukup tinggi dengan rata-rata kenaikan sebesar 40,6% per tahun selama periode 2010-2015. Informasi pengeluaran untuk ternak kerbau tidak terdokumentasi dengan baik, meskipun tidak dipungkiri bahwa terjadi pengeluaran ternak kerbau dari Provinsi Sulawesi Selatan ke wilayah lain. Pengeluaran ternak kerbau utamanya dipasok dari Kabupaten Toraja Utara, Luwu Utara dan Jeneponto. Ternak sapi yang diperdagangkan antar pulau dari wilayah ini umumnya adalah sapi Bali, dimana sapi betina untuk bibit dan sapi jantan untuk tujuan pematongan dengan pasar utama wilayah Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Maluku dan Papua.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat laju pertumbuhan populasi sapi di Sulawesi Selatan mencapai 9,7% per tahun dalam periode 2010-2015. Hal ini mengimplikasikan bahwa pertumbuhan populasi ternak sapi di Sulawesi Selatan relatif lebih rendah dibandingkan dengan laju kenaikan pematongan dan pengeluaran antar pulau atau wilayah. Oleh karena itu, upaya mengendalikan dan mencegah pematongan sapi betina produktif adalah suatu keniscayaan agar populasi sapi tidak semakin menurun. Hampir senada dengan wilayah lainnya, populasi ternak kerbau mengalami penurunan sebesar 2,4% per tahun dalam periode yang sama. Perhatian pemerintah harus serius dalam mendorong pengembangan usaha ternak kerbau yang memberikan kontribusi tidak sedikit terhadap konsumsi daging bagi wilayah ini.

## **PENYEBAB PEMOTONGAN SAPI BETINA PRODUKTIF**

Berbagai peraturan telah diterbitkan untuk melarang pematongan ternak sapi dan kerbau betina produktif. Hal ini di tingkat pusat adalah Peraturan Menteri Pertanian No. 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif. Di tingkat daerah, diantaranya terdapat Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 2/2003 tentang Pengeluaran Ternak Potong Sapi Bali; Peraturan Daerah No. 1/2015 tentang Pengendalian Pematongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif di Nusa Tenggara Barat; dan lain sebagainya. Namun dalam implementasi di lapang, hal tersebut belum berlangsung dengan baik sehingga tingkat pematongan ternak sapi dan kerbau betina produktif masih terus berjalan dengan *massive*.

Hasil diskusi intensif dengan multi pihak pelaku usaha sapi potong di wilayah sumber ternak dapat dikompilasi bahwa pemotongan ternak sapi dan kerbau betina produktif masih saja terjadi. Hal ini disebabkan antara lain: (1) Harga sapi betina lebih murah Rp. 500 ribu -1 juta per ekor dibandingkan dengan sapi jantan pada ukuran yang setara; (2) Terbatasnya ketersediaan sapi jantan, utamanya dengan ukuran bobot badan sekitar 250-300 kg karena sebagian besar sudah dilakukan perdagangan antar pulau; (3) Adanya penetapan kuota perdagangan/pengeluaran antar-pulau baik yang reguler maupun pada periode-periode tertentu yang kurang akurat, karena data dan asumsi yang belum tepat serta berpotensi terjadinya kolusi; (4) Belum konsistennya penegakan hukum/aturan/regulasi oleh pemerintah daerah dan penanggung jawab RPH/TPH; (5) Belum adanya kesepahaman tentang kriteria ternak betina produktif yang boleh/tidak boleh dipotong maupun sudah tertuang secara jelas dalam UU No. 18/2009 dan Permentan No. 35/2011; (6) Aturan/regulasi yang dibangun lebih didominasi oleh *punishment* dibandingkan dengan *reward* bagi peternak sapi potong; serta (7) Tingginya konversi lahan untuk tujuan pariwisata, pembangunan non-peternakan dan lain sebagainya sehingga mengakibatkan usaha peternakan tidak menarik. Pelarangan pemotongan dan pengeluaran ternak betina produktif, serta adanya kebutuhan uang tunai dari peternak, menyebabkan harga ternak betina produktif lebih murah dibandingkan dengan ternak jantan. Ketiadaan sapi jantan dan harga yang mahal menyebabkan jagal memilih memotong ternak betina produktif. Hal ini ditambah lagi dengan tidak ada kesadaran untuk menyelamatkan populasi ternak potong dan jagal tidak paham jika hal tersebut melanggar undang-undang.

Pengawasan pemotongan ternak yang sangat kurang oleh petugas baik di RPH maupun TPH menyebabkan terjadinya pemotongan ternak betina produktif. Nasrullah et al. (2010) melaporkan bahwa tingkat pemotongan ternak betina produktif di Sulawesi Selatan berkisar antara 35-41%. Hal ini dilakukan melalui pengamatan di 4 kabupaten yang merupakan sentra ternak potong, yakni Kabupaten Barru, Pare-Pare, Gowa dan Kota Makassar. Kuliner di Sulawesi Selatan, yaitu Coto Makassar yang semakin digemari oleh masyarakat, juga turut menyebabkan semakin meningkatnya permintaan terhadap sapi dan kerbau potong. Ternak betina produktif lebih disukai oleh jagal karena pada umumnya kondisi tubuhnya lebih baik dengan komposisi daging yang lebih banyak dibandingkan dengan ternak betina afkir. Tawaf et al. (2013) dalam studinya terhadap pemotongan ternak sapi di 20 RPH selama periode Juli-Agustus 2013 di wilayah Jawa dan Nusa Tenggara melaporkan bahwa telah terjadi pemotongan sapi lokal betina produktif sebesar 31,04%. Rumah potong hewan di wilayah

produsen lebih banyak memotong sapi betina produktif dibandingkan dengan RPH di wilayah konsumen. Pemotongan sapi betina produktif juga akan meningkat cukup tinggi menjelang bulan puasa dan pada hari raya, sedangkan pada saat bulan puasa dan setelah hari raya secara proporsional mengikuti arus fluktuasi pemotongan sapi di setiap RPH. Hal ini diduga karena adanya desakan oleh tuntutan ekonomi seperti kebutuhan sehari-hari, pembayaran sekolah dan perayaan hari raya bagi masyarakat peternak.

Suardana et al. (2013) menyatakan bahwa tingkat pemotongan sapi Bali betina produktif di RPH Pesanggaran dan RPH Mambal di Bali berturut-turut mencapai 81,7 dan 87,5%. Lebih lanjut disampaikan bahwa meskipun sapi Bali adalah sapi yang memiliki tingkat fertilitas yang cukup tinggi (80%), namun dengan tingginya angka pemotongan SBP akan mengancam terhadap keberlanjutan usaha sapi Bali. Hal ini juga harus mendapat perhatian yang serius dari seluruh multi pihak pelaku usaha sapi potong, masyarakat dan pemerintah dalam upaya mempertahankan populasi sapi Bali sebagai plasma nutfah asli Indonesia.

Menurut Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali pada tahun 2012 telah dilakukan evaluasi jumlah populasi, dimana populasi sapi betina menurun 40 ribu ekor. Untuk menghindari penurunan populasi, pemerintah daerah melakukan moratorium pengeluaran sapi betina calon induk. Penurunan populasi tersebut disebabkan banyaknya pengeluaran sapi calon induk secara ilegal yang diperkirakan setiap minggu terdapat dua truk masing-masing berisi 20 ekor sapi dikirim ke Banyuwangi, Jawa Timur. Dalam setahun hal ini diperkirakan dapat mencapai 2.080 ekor, belum lagi pemotongan sapi betina yang belum mampu dicegah.

Pemotongan sapi betina produktif juga terjadi di Jawa Timur, diantaranya melalui suatu studi yang dilakukan melalui pengamatan di RPH Malang selama 2 bulan. Penelitian dilakukan terhadap pemotongan sapi betina PO dan PFH di RPH Singosari dan RPH Gadang yang merupakan RPH rujukan. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa telah terjadi pemotongan SBP berturut-turut sebesar 15,10 dan 26% di masing-masing RPH (Soejosopoetro 2011). Lebih lanjut dinyatakan bahwa imbang jumlah pemotongan dengan populasi tidak melampaui batas toleransi yaitu sebesar 12%. Apabila persentase pemotongan ternak betina produktif melebihi batas toleransi ini akan mengganggu pasokan sapi potong dan upaya peningkatan populasi sapi potong di wilayah ini.

#### **MENGOPTIMALKAN PERAN TATA KELOLA RUMAH POTONG PERUSAHAAN DAERAH**

Penyelamatan sapi dan kerbau betina produktif baik untuk diperdagangkan maupun dipotong harus



dipandang secara holistik dari hulu ke hilir. Hal ini tidak dapat hanya dilihat dari sisi hilir di tingkat pedagang antar wilayah/pulau maupun jagal di RPH, namun harus mempertimbangkan aspek di hulu dengan peternak sebagai subjek utama pelaku usaha. Karakteristik peternak dalam mengusahakan sapi potong (utamanya skala kecil) belum berorientasi produksi maupun keuntungan, sebagian besar masih bersifat usaha sampingan dan merupakan aset maupun tabungan yang sewaktu-waktu dapat dijual jika terdapat kebutuhan ekonomi yang mendesak. Hal ini berlaku hampir di semua wilayah di Indonesia, baik di Pulau Jawa yang sudah lebih maju, maupun di wilayah lain di luar Pulau Jawa (Kusnadi 2008; Kalangi et al. 2014; Priyanti et al. 2015; Rusdianto et al. 2015). Lebih lanjut, Mappigau et al. (2014) menyatakan bahwa berdasarkan hasil analisis komponen perilaku, peternak memiliki peluang yang besar untuk berperilaku dalam penjualan sapi betina produktif. Meskipun dari aspek sikap sekitar 64% peternak mengetahui konsekuensi negatif dari penjualan SBP, namun secara norma subjektif dan aspek kontrol perilaku, pematangan ternak betina produktif tetap berlangsung. Hal ini disebabkan karena kurangnya tekanan sosial yang memaksa peternak untuk tidak menjual sapi betina produktif sehingga sangat mudah untuk melakukan penjualan sapi betina produktif.

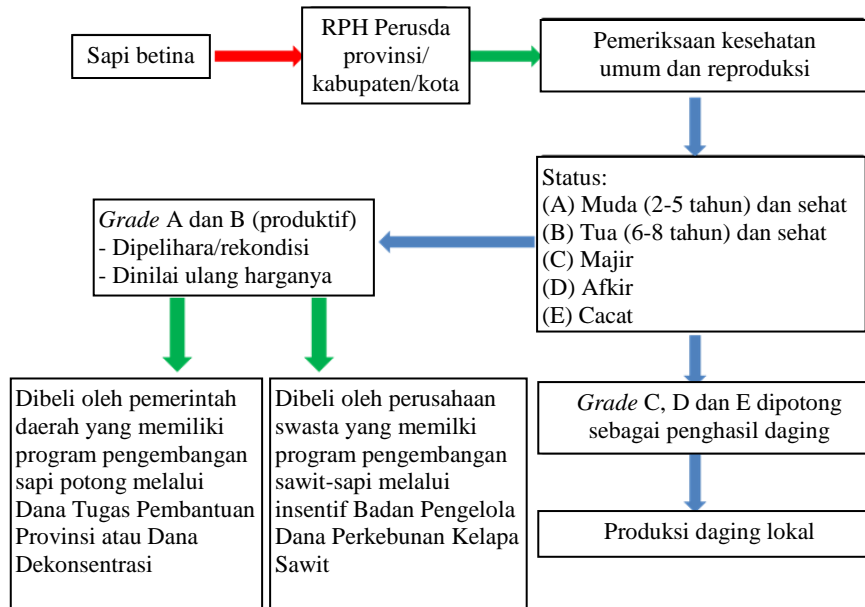
Pembentukan Perusahaan Daerah (PD) diusulkan untuk dapat menjaring ternak-ternak betina produktif yang akan dipotong maupun yang akan diperdagangkan antar pulau. Terdapat sedikitnya lima PD yang bergerak dalam bisnis RPH di Indonesia, yaitu PD RPH Kota Medan, PD Dharma Jaya di DKI Jakarta, PD Pegirian di Surabaya, PD RPH Kota Malang dan PD RPH Kota Makassar. PD RPH ini pada dasarnya memiliki tugas yang sama, salah satunya di Kota Medan yaitu untuk: (1) Menyediakan dan menampung ternak potong; (2) Mengelola RPH dan pematangan ternak; (3) Menyediakan *cold storage*; (4) Memeriksa kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong; (5) Mengangkut, mendistribusikan dan memasarkan daging; (6) Melaksanakan kegiatan usaha lainnya yang menunjang kegiatan PD dalam arti luas; dan (7) Melaksanakan usaha-usaha lain yang ditetapkan direksi dan mendapat persetujuan walikota (Pemkot Malang; Pemkot Medan 2014).

Mekanisme penyelamatan ternak betina produktif yang diusulkan disajikan secara rinci dalam Gambar 1. Ternak-ternak betina yang masuk ke wilayah kandang penampungan di RPH dilakukan pemeriksaan kesehatan secara umum dan khususnya organ reproduksi. Setiap RPH memiliki sumberdaya manusia dengan latar belakang keilmuan teknis, salah satunya adalah dokter hewan atau medis veteriner yang dapat memeriksa status kesehatan ternak. Hasil pemeriksaan ini dilanjutkan dengan identifikasi status ternak, yang

dikelompokkan dalam: (1) Kelompok A untuk ternak-ternak betina muda dan sehat (umur 2-5 tahun); (2) Kelompok B untuk ternak-ternak betina tua dan sehat (umur 6-8 tahun); (3) Kelompok C untuk ternak majir; (4) Kelompok D untuk ternak afkir; dan (5) Kelompok E untuk ternak cacat. Kelompok A dan B merupakan ternak-ternak betina yang harus diselamatkan, sedangkan Kelompok C, D dan E dapat dipotong sebagai penghasil daging dan menjadi produksi daging lokal. Ternak-ternak di Kelompok A dan B perlu dilakukan rekondisi tubuhnya dengan pemeliharaan lebih lanjut, serta dinilai ulang untuk penentuan harga jual. Ternak-ternak inilah yang kemudian dibeli oleh PD untuk selanjutnya menjadi sumber pasokan ternak betina produktif yang dapat diperdagangkan antar pulau. Dengan jumlah pematangan sapi setiap tahun sebesar 185-200 ribu ekor di Bali, NTB dan NTT, maka terdapat potensi sejumlah 90-100 ribu ekor sapi betina produktif yang dapat dijadikan sapi indukan di daerah pengembangan.

Ternak-ternak betina yang telah menjadi milik PD bahkan perusahaan swasta di daerah dapat diperdagangkan antar pulau sebagai sumber pemasok sapi indukan bagi program-program pemerintah yang membutuhkan. Berbagai program pemerintah seperti Sentra Peternakan Rakyat (SPR), Integrasi Tanaman-Ternak, Pengembangan Padang Penggembalaan dan Lahan Eks-Tambang semuanya membutuhkan sapi indukan. Wilayah-wilayah ini utamanya di daerah Sumatera dan Kalimantan yang memiliki biomasa untuk pakan ternak yang berlimpah, ironisnya justru "kosong sapi". Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY yang merupakan pusat atau konsentrasi populasi sapi potong, kondisinya tidak jauh berbeda dengan Bali dan Nusa Tenggara karena daya dukung pakan yang terbatas. Usaha perkebangbiakkan untuk menghasilkan sapi bakalan di Pulau Jawa sangat tidak kompetitif, karena biaya produksi mencapai lebih dari Rp. 5 juta/pedet sehingga dalam jangka panjang sangat sulit mengandalkan wilayah tersebut sebagai pemasok utama daging untuk keperluan di dalam negeri sehingga perlu dicarikan alternatif pengembangannya. Tentunya harus dibangun kebijakan atau instrumen yang akan ditetapkan dan memperhatikan kepentingan semua pihak (peternak, pedagang, jagal dan konsumen), termasuk insentif bagi daerah asal maupun daerah pengembangan sapi potong.

Hastang et al. (2014) melaporkan bahwa *pallembara* atau pedagang perantara penjualan daging sapi dari pengusaha jagal memegang peranan penting dalam aliran tata niaga sapi di PD RPH Kota Makassar. *Pallembara* ini akan melakukan perdagangan daging berjenjang kepada pelanggan berikutnya, ada yang berupa pedagang pengecer di pasar tradisional dan pasar swalayan sebelum ke konsumen akhir. Oleh karenanya, dalam upaya penyelamatan ternak betina



**Gambar 1.** Mekanisme penyelamatan sapi betina produktif

produktif harus melibatkan peran *pallembara* ini selain juga pengusaha jagal. Kebijakan yang akan diterapkan harus dapat memberikan kompensasi terhadap usaha *pallembara* agar masih berlangsung. Pelarangan pemotongan ternak betina produktif sudah sangat jelas dan tegas, namun sebagian besar pelaku usaha belum sepenuhnya memahami dan mematuhi ketentuan ini. Larangan ini justru membuat harga sapi betina produktif murah ketika peternak yang memerlukan uang menjual sapi. Ketentuan pelarangan tersebut yang dibarengi dengan pembatasan pengeluaran ternak betina ternyata justru lebih menekan harga sapi. Sementara itu hampir semua sapi jantan dikuasai pedagang antar pulau sehingga jagal tidak mempunyai pilihan yang lebih baik, selain memotong ternak betina produktif.

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan sudah melakukan beberapa upaya untuk pencegahan pemotongan SBP ini dengan mengoptimalkan tim pengawasan terpadu yang melibatkan Polisi Republik Indonesia. Hal lain juga telah dilakukan melalui pengawasan secara terpadu dan mengoptimalkan tim supervisi dan pendampingan dalam penyampaian laporan pemotongan SBP. Beberapa daerah utamanya di Pulau Jawa dan telah dilakukan sosialisasi kepada para jagal dan peternak untuk tidak memotong dan menjual SBP. Berbagai spanduk dan baliho di pasar-pasar hewan dan RPH tentang penerapan sanksi jika melakukan pemotongan SBP juga sudah banyak dijumpai, namun tampaknya hal ini belum memberikan

hasil yang optimal. Hal ini harus tetap dilakukan secara konsisten dan terpadu untuk memitigasi terjadinya pemotongan SBP.

Pemotongan SBP di beberapa wilayah sumber bibit seperti di Kupang, NTT, dianggap sebagai suatu hal yang biasa (Diwyanto 2011) (Gambar 2). Di lain pihak, pengeluaran sapi betina produktif dilarang untuk mencegah terjadinya pengurusan. Seandainya sapi-sapi betina yang saat ini dipotong di RPH diperbolehkan untuk diantar-pulaukan, maka dapat diperkirakan harga sapi betina produktif akan meningkat dan jagal tidak akan memotongnya. Perubahan kebijakan ini tentunya harus dibarengi dengan penyediaan sapi jantan bagi jagal lokal, serta pengaturan kuota pengeluaran sapi jantan maupun sapi betina dengan lebih cermat. Untuk menghambat pemotongan sapi di kawasan ini juga diperlukan dukungan kebijakan dan program lain untuk pengembangan ternak selain sapi, sebagai substitusi untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat setempat. Selain itu, kebijakan untuk meningkatkan pendapatan daerah dari setiap RPH juga menjadi alasan petugas untuk melakukan pembiaran pemotongan sapi betina produktif. Oleh karena itu, kebijakan dalam penetapan retribusi untuk pemotongan ternak di setiap RPH dapat dimanfaatkan sebagai instrumen dalam pengendalian/pemotongan sapi betina produktif.

Kebijakan pendukung lainnya adalah menerapkan dengan tegas aturan batas minimal pengeluaran sapi potong antar pulau. Di NTT batas minimal tersebut adalah 275 kg dan di Bali mencapai 375 kg. Dengan



**Gambar 2.** Sapi betina produktif di kandang penampungan salah satu RPH yang siap dipotong

berbagai alasan tidak mustahil banyak sapi dengan berat di bawah batas minimal juga dipedagangkan antar pulau. Alasan utamanya adalah peternak membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga harus menjual sapi lebih awal. Pada sisi lain, persaingan yang ketat antar pedagang pengirim di wilayah Bali, NTT dan NTB mengharuskan pedagang untuk berlomba memenuhi kuota yang sudah diberikan sehingga terpaksa mengirim sapi dengan berat di bawah batas minimal. Pengetatan pengawasan berat minimal tersebut dapat berakibat sapi jantan ukuran kecil tersebut dibesarkan oleh pedagang pengirim atau dijual di RPH sebagai ternak potong. Konsistensi aturan menyebabkan sapi potong ukuran kecil berlebih di pasar lokal dan harganya akan menurun. Jika harganya menurun, maka pejagal lokal akan tertarik membeli dan menggantikan sapi betina produktif yang terjaring oleh PD.

Perusahaan daerah ini juga dapat berperan dalam memperbaiki sistem logistik perdagangan sapi hidup dan daging sapi dari wilayah sumber ternak di Timur Indonesia menuju wilayah Barat sebagai sumber konsumen. Rouf et al. (2014) melaporkan bahwa sistem logistik sapi potong menunjukkan kinerja yang kurang baik sehingga biaya pengiriman sapi menjadi relatif mahal. Seiring dengan pembangunan tol laut dan perbaikan infrastruktur di pelabuhan, maka PD memiliki peluang usaha yang cukup besar dalam mengisi perdagangan sapi antar pulau dengan mempertimbangkan keberlanjutan usaha sapi potong yang berdaya saing.

Perusahaan daerah juga dapat berusaha dalam penyediaan sapi-sapi bakalan jantan sebagai pengganti pematangan SBP agar usaha RPH dapat berlangsung dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan usaha *feedlot* yang mengimpor sapi bakalan selama ini dalam

memenuhi kebutuhan daging sapi nasional. Alternatif lain yang diusulkan adalah bekerjasama dengan UPT pemerintah yang membidangi tugas peternakan dan kesehatan hewan di daerah untuk membangun pengembangan usaha penggemukan sapi potong di tingkat peternakan rakyat dalam bentuk kelompok. Hal ini dapat berupa pola kemitraan, dimana PD berperan sebagai inti, sedangkan kelompok peternak sebagai plasma. Usaha penggemukan memiliki orientasi usaha yang jelas sehingga periode waktu penjualan dapat disinergiskan dengan kondisi RPH saat memutuskan pasokan daging sapi.

## REKOMENDASI KEBIJAKAN

Peraturan daerah yang mengatur pelarangan pematangan dan pengeluaran SBP perlu ditinjau kembali efektivitasnya. Hal ini terkait dengan kuota pengeluaran (perdagangan antar pulau) ternak jantan yang seharusnya diperhitungkan setelah kebutuhan pematangan lokal terpenuhi sehingga tidak ada alasan bagi jagal untuk memotong ternak betina produktif karena terbatasnya (tidak tersedia) ternak jantan. Konsekuensi dari kebijakan ini akan mengurangi pengeluaran ternak jantan dan sekaligus juga akan menurunkan ternak betina produktif yang akan dipotong sehingga akan diperoleh surplus ternak betina produktif. Ternak-ternak betina produktif inilah yang dapat diselamatkan untuk direlokasi ke daerah sumber pakan seperti di Sumatera dan Kalimantan melalui perdagangan antar pulau (sekaligus juga dapat mengkompensasi perdagangan sapi jantan antar pulau yang dikurangi). Kebijakan ini juga harus didukung oleh peraturan daerah yang membolehkan pengeluaran kelebihan ternak betina produktif untuk dikembangkan di luar Bali, NTB dan NTT dengan

harga yang lebih kompetitif (diperlukan insentif bagi pemda yang menerapkan ketentuan ini).

Diperlukan adanya pengaturan TPH yang resmi sehingga proses pengawasan dapat dilakukan dengan baik agar diperoleh informasi yang akurat terkait dengan jumlah pemotongan tercatat untuk proses perencanaan lebih lanjut. Penegakan hukum secara konsisten terhadap pemotongan ternak betina produktif memang harus dilakukan dengan tegas dan terus menerus. Hal ini juga termasuk penyamaan pemahaman tentang kriteria dan *grade* ternak betina produktif yang boleh dipotong untuk memenuhi kebutuhan daging lokal. Insentif bagi daerah yang akan menjual ternak betina produktif sebagai indukan/bibit harus menjadi perhatian pemerintah yang serius, salah satunya adalah dengan mengalokasikan ketersediaan anggaran bagi daerah pengembangan yang akan membelinya.

Dalam melestarikan sapi lokal seperti sapi Bali, diperlukan kebijakan makro untuk menetapkan harga jual sapi bibit (termasuk sapi indukan) yang memiliki kapasitas genetik baik tidak dengan cara ditaksir seperti yang berlangsung saat ini. Diharapkan beberapa kebijakan atau instrumen yang akan ditetapkan tersebut tetap memperhatikan kepentingan semua pihak, baik peternak, pedagang, jagal dan konsumen. Penerapan harga sapi indukan sesuai kualitas, pertama-tama dapat dilakukan untuk pengadaan proyek pemerintah dengan sistem dagang antar pemerintah yang dimediasi melalui para pedagang antar lokasi sumber sapi dan tujuan pengiriman sapi. Dalam hal ini diperlukan keterlibatan dan keterbukaan pedagang melalui pengadaan sapi indukan antar daerah dalam kegiatan proyek pemerintah.

Dalam upaya menjaga tingkat stabilitas populasi ternak potong, penerapan teknologi pakan dapat dikembangkan di tingkat peternak yang diharapkan dapat menjamin kecukupan pakan sepanjang tahun. Penyediaan air menjadi kebutuhan mutlak untuk mendukung peningkatan produktivitas ternak, utamanya di wilayah NTT. Upaya pembuatan embung maupun pemanfaatan sumber air dalam (*ground water*) perlu dijajagi kemungkinannya dan harus dapat segera direalisasikan. Permasalahan sosial yang sering terjadi di wilayah Timur Indonesia harus ditangani secara serius melalui kearifan lokal sehingga tidak akan mengganggu kehidupan masyarakat peternak.

## KESIMPULAN

Bukti empiris menunjukkan bahwa telah terjadi pemotongan sapi betina produktif (SBP) yang cukup tinggi di wilayah Indonesia Timur, hingga rata-rata mencapai 72%. Rumah potong hewan merupakan garda terakhir yang dapat menyelamatkan pemotongan SBP ini sehingga konsep mekanisme penyelamatannya

harus dilakukan di RPH. Beberapa daerah telah memiliki RPH dengan badan hukum perusahaan berupa Perusda maupun BUMN sehingga diharapkan mekanisme penyelamatan SBP dapat berlangsung secara orientasi bisnis.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Tim Kajian Antisipatif dan Responsif Kebijakan Strategis Peternakan dan Veteriner Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan yang telah membantu melakukan diskusi intensif di wilayah Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan. Terima kasih ini disampaikan kepada Prof. (R) Dr. Sjamsul Bahri, Prof. (R) Dr. Budi Haryanto, Prof. (R) Dr. Tjeppey D Soedjana, dan Alm. Prof. (R) Dr. Kusuma Diwyanto atas dedikasinya yang telah memberikan inspirasi dan koreksi/saran masukan sehingga naskah ini dapat diselesaikan dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Astuti M. 2004. Potensi dan keragaman sumberdaya genetik sapi Peranakan Ongole (PO). *Wartazoa*. 14:98-106.
- Baco S, Wello B, Malaka R, Hatta M. 2014. Tingkat kematian dan pertumbuhan pedet sapi Bali melalui perbaikan manajemen dengan intervensi pakan konsentrat berbahan lokal. Dalam: Natsir A, Ali HM, Agustina L, Syamsu JA, Syahrir S, Sirajuddin SN, Baba S, Dagong MIA, Hakim MR, penyunting. Peningkatan Produktivitas Ternak Lokal. Prosiding Seminar Nasional Optimalisasi Sumberdaya Lokal pada Peternakan Lokal Berbasis Teknologi. Makassar, 9-10 Oktober 2014. Makassar (Indonesia): Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin. hlm. 10-19.
- Bamualim AM. 2011. Pengembangan teknologi pakan sapi potong di daerah semi-arid Nusa Tenggara. *J Pengembangan Inovasi Pertanian*. 4:175-188.
- BPS. 2013. Sensus ternak. 2013. Sensus pertanian 2013. Angka nasional hasil survey ST 2013, subsektor rumah tangga usaha peternakan. Jakarta (Indonesia): Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2014. Konsumsi beberapa macam bahan makanan penting, 2007-2014. Survei sosial ekonomi nasional. Jakarta (Indonesia): Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2015. Jumlah penduduk Indonesia. Jakarta (Indonesia): Badan Pusat Statistik.
- BPS NTT. 2015. Nusa Tenggara Timur dalam angka. Kupang (Indonesia): Badan Pusat Statistik Povinsi Nusa Tenggara Timur.
- Dinas PKH Provinsi Bali. 2015. Statistik peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015. Denpasar (Indonesia):

- Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali.
- Dinas PKH Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2015. Statistik peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015. Mataram (Indonesia): Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Dinas PKH Provinsi Nusa Tenggara Timur. 2015. Statistik peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015. Kupang (Indonesia): Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Dinas PKH Provinsi Sulawesi Selatan. 2015. Statistik peternakan dan kesehatan hewan tahun 2015. Makassar (Indonesia): Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan.
- Ditjen PKH. 2016. Statistik peternakan dan kesehatan hewan 2016. Jakarta (Indonesia): Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.
- Diwyanto K. 2011. Selamatkan sapi betina produktif. Sinar Tani. Edisi 30 Maret-5 April 2011 No.3399 Tahun XXI.
- Hastang, Sirajuddin SN, Asnawi A. 2014. Efisiensi pemasaran daging sapi pada Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Kota Makassar. Dalam: Natsir A, Ali HM, Agustina L, Syamsu JA, Syahrir S, Sirajuddin SN, Baba S, Dagong MIA, Hakim MR, penyunting. Peningkatan Produktivitas Ternak Lokal. Prosiding Seminar Nasional Optimalisasi Sumberdaya Lokal pada Peternakan Lokal Berbasis Teknologi. Makassar, 9-10 Oktober 2014. Makassar (Indonesia): Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin. hlm. 314-320.
- Hermansyah, Mastur. 2008. Pemotongan ternak tidak tercatat, studi di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam: Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Sapi Potong untuk Mendukung Percepatan Pencapaian Swasembada Daging Sapi 2008-2010. Palu, 24 November 2008. Bogor (Indonesia): Puslitbangnak. hlm. 166-171.
- Kalangi LS, Syaukat Y, Kuntjoro SU, Priyanti A. 2014. Technical efficiency of beef cattle breeding business in East Java Province. Media Peternakan. 37:136-142.
- Kementan-BPS. 2011. Pendataan sapi potong, sapi perah dan kerbau 2011. Rilis hasil akhir PSPK 2011. Jakarta (Indonesia): Kementerian Pertanian dan Badan Pusat Statistik.
- Kusnadi U. 2008. Inovasi teknologi peternakan dalam sistem integrasi tanaman-ternak untuk menunjang swasembada sapi. J Pengembangan Inovasi Pertanian. 1:189-205.
- Mappigau P, Sirajuddin SN, Kasim K, Lestari V, Rohani S. 2014. Perilaku peternak sapi potong dalam penjualan sapi betina produktif (kasus pada sentra produksi sapi Bali di Sulawesi Selatan). Dalam: Natsir A, Ali HM, Agustina L, Syamsu JA, Syahrir S, Sirajuddin SN, Baba S, Dagong MIA, Hakim MR, penyunting. Peningkatan Produktivitas Ternak Lokal. Prosiding Seminar Nasional Optimalisasi Sumberdaya Lokal pada Peternakan Lokal Berbasis Teknologi. Makassar, 9-10 Oktober 2014. Makassar (Indonesia): Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin. hlm. 303-313.
- Nasrullah, Nurhayu A, Yusmasari, Sariubang M, Armiaty, Pasaribu AM. 2010. Pemotongan sapi betina produktif di Sulawesi Selatan. Makassar (Indonesia): BPTP Sulawesi Selatan.
- Oberman R, Dobbs R, Budiman A, Thompson F, Rossé M. 2012. The archipelago economy: Unleashing Indonesia's potential. Report McKinsey Global Institute September 2012. McKinsey Co [Internet]. [cited 2013 Dec 16]. Available from: [http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/the\\_archipelago\\_economy](http://www.mckinsey.com/insights/asia-pacific/the_archipelago_economy)
- Pemkot Malang. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Kota Malang. Malang (Indonesia): Pemerintah Kota Malang.
- Pemkot Medan. 2014. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan Kota Medan. Medan (Indonesia): Pemerintah Kota Medan.
- Priyanti A, Cramb RA, Hanifah VW, Mahendri IGAP. 2015. Small-scale cattle raising in East Java: A pathway out of poverty? J Asia Pacific Viewp. 56:335-350.
- Rouf A, Daryanto A, Fariyanti A. 2014. Daya saing usaha sapi potong di Indonesia: Pendekatan *domestic resources cost*. Wartazoa. 24:97-107.
- Rusastra IW. 2014. Perdagangan ternak dan daging sapi: rekonsiliasi kebijakan impor dan revitalisasi pemasaran domestik. Forum Penelitian Agro Ekonomi. 32:59-71.
- Rusdianto SW, Daryanto HKS, Kuntjoro, Priyanti A. 2015. Pengaruh perubahan harga sapi terhadap permintaan input dan penawaran output usaha penggemukan sapi Bali. J Informasi Pertanian. 24:223-232.
- Sianturi RG, Purwantara B, Supriatna I, Amrozi, Situmorang P. 2012. Optimasi inseminasi buatan pada kerbau lumpur (*Bubalus bubalis*) melalui teknik sinkronisasi dan ovulasi. JITV. 17:92-99.
- Soejosopoetro B. 2011. Studi tentang pemotongan sapi betina produktif di RPH Malang. J Ternak Tropika. 12:22-26.
- Suardana IW, Sukada IM, Suada IK, Widiasih DA. 2013. Analisis jumlah dan umur sapi Bali betina produktif yang dipotong di rumah pemotongan hewan Pesanggaran dan Mambal Provinsi Bali. J Sain Vet. 31:43-48.

- Talib C. 2002. Sapi Bali di daerah sumber bibit dan peluang pengembangannya. *Wartazoa*. 12:100-107.
- Tawaf R. 2015. Potret bisnis sapi potong dan sapi perah di Indonesia. 2015. Dalam: Seminar Asosiasi Obat Hewan Indonesia. Jakarta, 18 November 2015. Jakarta (Indonesia): Asosiasi Obat Hewan Indonesia.
- Tawaf R, Rachmawan O, Firmansyah C. 2013. Pemotongan sapi betina umur produktif dan kondisi RPH di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara. Dalam: Prosiding Workshop Nasional Konservasi dan Pengembangan Sapi Lokal. Bandung, 13 November 2013. Bandung (Indonesia): Fakultas Peternakan, Universitas Padjadjaran.
- Yendraliza, Zespin BP, Udin Z, Jaswani. 2012. Penampilan reproduksi kerbau *post partum* pada berbagai level GnRH yang disinkronisasi dengan PGF2 $\alpha$ . *JITV*. 17:107-111.